

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis, diantaranya sebagai berikut, pertama yaitu tinjauan pustaka guna memaparkan konsep dasar dari variabel yang diteliti, kedua yaitu penelitian terdahulu. Setelah itu membahas mengenai kerangka berpikir yang menjelaskan tentang model serta hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, kemudian diikuti dengan hipotesis yang diajukan

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada hakikatnya manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Adapun tolak ukur mengenai klasifikasi negara maju atau negara berkembang selain pertumbuhan ekonomi ada juga pembangunan manusia yg diukur oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan produktif. *Human development theory* merupakan proses memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia yang dicetuskan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia yang sebelumnya berlandaskan rata-rata pendapatan perkapita. Menurut *United Nations Development Programme (UNDP, 1990)* pendapatan rata-rata tidak secara detail menggambarkan kondisi sumber daya manusia di suatu wilayah. Hal ini karena kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin cenderung tinggi, sehingga penduduk yang pada dasarnya miskin akan terdata memiliki kesejahteraan lebih tinggi.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan negara maju, negara berkembang, dan mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien serta efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang serta meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat.

Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi, berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh, dan aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Marisca dan Haryadi, 2016). Sebagaimana dikutip dari laporan *United Nations Development Programme (UNDP, 1995)* dalam Fretes (2017) ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia yaitu sebagai berikut :

1. Mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan.

3. Tidak hanya upaya meningkatkan kemampuan manusia saja, tetapi juga upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung empat unsur pokok, yaitu :
 - a. Produktifitas (*Productivity*)

Masyarakat harus mampu meningkatkan produktifitas dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan serta lapangan pekerjaan.
 - b. Pemerataan (*Equity*)

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil.
 - c. Kestinambungan (*Sustainability*)

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan juga untuk generasi yang akan datang.
 - d. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan tidak untuk kepentingan pribadi.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Konsep pembangunan manusia tidak berhenti pada kelima hal tersebut, melainkan terdapat beberapa konsep pembangunan sumber daya dalam konteks makro yang mencakup berbagai aktivitas, yaitu pengembangan pendidikan, dan pelatihan, kesehatan, dan gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan ditempat kerja, serta kehidupan politik yang bebas (*United Nations Development Programme, 2001*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Berdasarkan konsep pembangunan manusia, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0 – 100 dengan kategori sebagai berikut :

1. Sangat Tinggi : ≥ 80
2. Tinggi : $70 \leq \text{IPM} < 80$
3. Sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$
4. Rendah : < 60

Selain itu adapun manfaat penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain sebagai berikut :

1. Indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
2. Menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pembangunan yang fokus pada manusia harus dilakukan secara seimbang antara membangun dan memanfaatkan kemampuan. Misalnya kemampuan untuk mencapai derajat kesehatan dan pendidikan yang lebih baik serta umur yang lebih panjang, harus disertai bagaimana manusia memanfaatkan kemampuannya untuk meningkatkan kualitas hidup ketingkat yang lebih baik.

Mengukur kecepatan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbandingan antara perubahan

capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka semakin cepat pula peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1}}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

IPM_t : Indeks pembangunan manusia suatu wilayah pada tahun t

$\text{IPM}_{(t-1)}$: Indeks pembangunan manusia suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.1.1.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran *Human Development Indeks (HDI)* adalah sebagai berikut (*United Nations Development Programme, Human Development Report, 1993*) :

1. Indeks Harapan Hidup (*Longevity*)

Pengukuran dengan indikator penghitungan harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*).

2. Indeks Pendidikan (*Educational Achievement*)

Pengukuran dengan dua indikator, yakni angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas (*adult literacy rate*) dan angka banyaknya penduduk tahun rata-rata usia 25 tahun keatas yang masih bersekolah (*the mean years of schooling*).

3. Indeks Hidup Layak (*Access to Resource*)

Pengukuran dengan menggunakan angka pengeluaran riil perkapita.

Rata-rata aritmatik yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \times 100$$

Keterangan :

X_1 : Indeks harapan hidup

X_2 : Indeks pendidikan

X_3 : Indeks standar hidup layak

Adapun indikator lain yang digunakan dalam pengukuran setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rumus yang digunakan sebagai berikut :

1. Dimensi Kesehatan

Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dihitung dari hasil sensus, dan survei kependudukan.

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Dimensi Pendidikan

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal dan harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, terhitung pada penduduk berusia tujuh tahun ke atas.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Dimensi Hidup Layak

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity (PPP)*. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota.

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{Pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{min})}$$

Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao, sebagai berikut :

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan :

P_{ik} : Harga komoditas i di Jakarta Selatan

P_{ij} : Harga komoditas i di Kabupaten/Kota j

m : Jumlah Komoditas

Adapun paket komoditas penghitungan paritas daya beli, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penghitungan Paritas Daya Beli

Makanan		Non Makanan		Total
66 Komoditas (39.80%)	+	30 Komoditas (36.90%)	=	96 Komoditas (76.70%)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Rata-rata geometrik yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

Keterangan :

Ikesehatan : Angka harapan hidup

Ipendidikan : Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah

Ipengeluaran : Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Namun, alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setidaknya ada dua hal mendasar, yaitu :

1. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Angka Melek Huruf (AMH) di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik, dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif menyebabkan indikator komposit tidak relevan. Oleh karena itu, indikator Angka Melek

Huruf (AMH) dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya adalah indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Indikator ini disadari bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita kurang menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

2. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah.

Menurut (Todaro M. P., 1999) Pembangunan manusia terdapat tiga nilai inti pembangunan universal yang dijadikan tujuan utama yaitu :

1. Kecukupan

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Apabila salah satu kebutuhan tersebut belum terpenuhi akan menyebabkan terjadinya keterbelakangan.

2. Jati Diri

Masyarakat mampu menjadi manusia seutuhnya jika adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, mampu menghargai diri sendiri, merasa diri pantas, dan layak melakukan sesuatu.

3. Kebebasan dari Sikap Menghamba

Kemampuan untuk berdiri tegak dan mandiri sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materil dalam kehidupan dan bebas terhadap pilihan.

2.1.2 Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Adapun menurut penelitian Dewi (2006) dan Syaiful (2008) bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas asset.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah,

peralatan, dan mesin, gedung, dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta asset tetap lainnya.

Menurut Hayek (1945) *theory fiscal federalism* merupakan proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang dan jasa publik dibanding pemerintah pusat.

2.1.2.1 Indikator Belanja Modal

Abdullah (2008) menjelaskan bahwa belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (*fund*), dana bantuan pemerintah yang selalu dialokasikan untuk membiayai belanja modal adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara keseluruhan jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi besarnya alokasi belanja modal pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

1. Kelemahan perencanaan belanja pemerintah daerah.

Proporsi alokasi belanja daerah masih didominasi kepentingan operasional rutin pemerintahan dibandingkan dengan alokasi belanja untuk kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik. Hal ini tentunya memengaruhi besarnya anggaran belanja modal pemerintah daerah.

2. Ketersediaan sumber-sumber dana belanja daerah.

Pendapatan daerah dan pembiayaan merupakan sumber-sumber dana belanja daerah. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas untuk membiayai belanja daerah, maka diperlukan adanya bantuan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membantu pendanaan belanja daerah dan menggunakan dana pembiayaan bila terjadi defisit anggaran. Namun tidak tersedia sumber-sumber dana belanja daerah yang cukup maka sangat riskan untuk bisa menyediakan anggaran yang besar, khususnya untuk belanja modal.

3. Luasnya daerah yang perlu dikembangkan dan dibangun.

Daerah yang padat pembangunan tentunya tidak membutuhkan alokasi belanja modal yang banyak. Pengalokasian dana pemeliharaanlah yang perlu ditingkatkan. Namun bagi daerah yang baru dimekarkan tentunya membutuhkan alokasi dana yang sangat besar pada belanja modalnya, karena membutuhkan banyak pembenahan, pembangunan, penyediaan sarana, dan prasarana publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan belanja modal dapat secara langsung memengaruhi produktifitas faktor-faktor lain yang dapat merangsang peningkatan *output* ekonomi dan secara tidak langsung terkait dengan eksternalitas. Adanya infrastruktur yang berkualitas maka dapat mengurangi biaya ketergantungan terhadap sektor swasta seperti penyediaan air bersih, listrik maupun jalan. Pengeluaran biaya daerah ke sektor swasta juga dapat dikurangi melalui peningkatan modal manusia dan produktifitas tenaga kerja sebagai hasil atas investasi publik.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 bahwa belanja modal diklasifikasikan dalam lima kategori utama, diantaranya :

1. Belanja Modal Tanah

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/penyelesaian, balik nama, dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, peningkatan kapasitas peralatan, dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan sampai peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung, dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/peningkatan pembangunan, pembuatan, dan perawatan serta untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi, dan jaringan dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik lainnya

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/peningkatan pembangunan, pembuatan, dan perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria.

Belanja modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah asset tetap yang dimiliki oleh daerah. Setiap tahun diadakan pengadaan asset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Karena pada dasarnya belanja modal merupakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan belanja modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga (Halim, 2008).

2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Sejak dulu kemiskinan telah menjadi masalah serius, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan yang dialami oleh banyak negara (Yacoub, 2012). Teori anggaran pro kaum miskin, teori ini merupakan penganggaran berdasarkan penilaian kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan melibatkan kelompok miskin untuk ikut menentukan skala prioritasnya. Teori ini dimaknai sebagai sebuah penganggaran yang ditujukan untuk

kemakmuran rakyat, khususnya kelompok masyarakat miskin melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel.

Tahun 2004 *World Bank* mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kelaparan, ketiadaan tempat tinggal, sakit, dan tidak mampu ke dokter, tidak mempunyai akses ke sekolah, dan tidak mengetahui cara membaca, tidak mempunyai pekerjaan, dan khawatir akan kehidupan di masa depan, kurangnya air bersih, tidak keberdayaan, ketiadaan, keterwakilan, dan kebebasan.

Tidak jauh beda dengan definisi *World Bank, United Nations Development Programme (UNDP)* juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, atau untuk memengaruhi proses politik, dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, *United Nations Development Programme (UNDP)* memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yang tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi saja.

Adapun definisi kemiskinan yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Selain itu Badan Pusat Statistik (BPS) juga menerbitkan tolak ukur kriteria miskin diantaranya sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari mata air tidak terlindungi.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya sampai tamat SD tidak lanjut lagi.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal sembilan kriteria diatas terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin. Adapun penyebab dasar kemiskinan menurut *World Bank* (2002) adalah :

1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal.
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana, dan prasarana.
3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.

5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
6. Rendahnya produktifitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.1.3.1. Indikator Tingkat Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang umum digunakan adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, kematian balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, fertilitas, kematian ibu, rata-rata harapan hidup, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, dan proporsi pengeluaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan pangan (kalori/protein), air bersih, pembangunan penduduk, urbanisasi, pendapatan perkapita, dan distribusi pendapatan (Adisasmita, 2005).

Tolak ukur kemiskinan tidak hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat juga tingkat kesehatan, pendidikan, dan keadilan, sebagaimana yang telah disebutkan *United Nations Development Programme (UNDP)* bahwasannya kemiskinan merupakan suatu masalah multidimensi.

Data kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sering menjadi dasar dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Seperti yang diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan dua

jenis data kemiskinan, yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Kedua data ini memiliki kriteria, pengukuran, dan cakupan kemiskinan yang berbeda. diantaranya :

1. Kemiskinan Makro

Data kemiskinan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selain Susenas digunakan juga Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) sebagai informasi tambahan yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan. Kemiskinan makro dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, dari kebutuhan dasar ini dihitung suatu garis yang disebut garis kemiskinan. Indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein.
- b. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- c. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air.
- d. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah.
- e. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, dan perawatan.

Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah US\$1,7 perorang perhari yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi, sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu :

a. Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index-P₀*)

Persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan.

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*)

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*)

Memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

2. Kemiskinan Mikro

Penghitungannya menggunakan pendekatan non moneter, di mana data mikro mampu menyediakan informasi mengenai penduduk miskin sampai dengan nama dan alamat penduduk miskin tersebut. Perbedaan yang terjadi selain metode dan pendekatan adalah juga cakupan.

Kemiskinan selalu berkaitan dengan pendapatan penduduk yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Tingkat hidup golongan masyarakat miskin tidak dapat dinaikkan hanya dengan menaikkan daya belinya melalui program kesejahteraan sosial yang biasanya berumur pendek. Peningkatan tingkat hidup golongan miskin hanya bisa dilaksanakan dengan peningkatan produktifitasnya.

Menurut Chambers (1983) bahwa kemiskinan dapat ditinjau dari empat sisi yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar. *World Bank* mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai kemiskinan terendah dalam hidup, dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, boros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan Struktural

Rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, bahkan kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Selain itu dalam penelitian (Zakaria, 2017) ada dua jenis kemiskinan yakni :

1. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi yang membuat masyarakat tidak menguasai sarana, sumber daya, dan fasilitas ekonomi yang secara merata.

2. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan yang berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum serta keadaan tanah yang tandus.

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa kemiskinan itu berbeda-beda, maka diperlukan strategi dan metode yang berbeda pula untuk mengatasi masalah kemiskinan, dengan memanfaatkan perangkat-perangkat daerah yang ada untuk mendeteksi secara tepat latar belakang masyarakat miskin. Sehingga memunculkan harapan dan gagasan tentang cara keluar dari kemiskinan yang dihadapi, maka dengan demikian masalah kemiskinan datang dari masyarakat miskin itu sendiri (mengatasi kemiskinan berbasis masyarakat miskin).

2.1.4 Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik (BPS) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menentukan jumlah penduduk pada

suatu wilayah dapat dilakukan dengan cara mengukur pada data demografi yang secara tepat atau akurat untuk dapat menjaringnya, kemudian pada saat menjaring data demografi tersebut dilakukan dengan tiga cara diantaranya ialah sensus, registrasi, dan survei penduduk.

Teori Jhon Stuart Mill menjelaskan bahwa manusia dapat memengaruhi perilaku demografinya, jika produktifitas seseorang tinggi maka terdapat kecenderungan memiliki keluarga kecil (fertilitas rendah). Apabila suatu saat terjadi kekurangan bahan makanan, keadaan tersebut hanya bersifat sementara dan dapat ditanggulangi dengan mengimpor makanan atau memindahkan penduduk ke daerah lain. Selain itu perlu peningkatan pendidikan sehingga penduduk lebih rasional mempertimbangkan dalam menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada.

Perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat tinggi, peningkatan jumlah penduduk memiliki pandangan dalam konteks pembangunan, yakni penduduk sebagai pemacu pembangunan dikarenakan populasi yang besar merupakan sumber permintaan berbagai macam barang dan jasa yang menggerakkan kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang menguntungkan, menurunkan biaya produksi, dan menciptakan sumber pasokan serta tenaga kerja dengan jumlah yang memadai, maka akan merangsang *output* yang lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk merupakan unsur penting dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja yang diperlukan

untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Selain itu, konsumsi dari penduduk akan menciptakan permintaan agregat yang memicu kegiatan produksi yang ditekankan pada efisiensi dan produktifitas dari penduduk tersebut.

Adapun faktor yang memengaruhi jumlah penduduk diantaranya :

1. Penduduk Alami (*Natural Increase*)

Jumlah penduduk yang jumlahnya didapat dari selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian dalam suatu wilayah.

$$T = L - M$$

Keterangan :

T : Jumlah pertumbuhan penduduk per tahun

L : Jumlah kelahiran per tahun

M : Jumlah kematian per tahun

2. Penduduk Migrasi (*Net Migration*)

Jumlah penduduk yang jumlahnya didapat dari hasil selisih jumlah penduduk migrasi masuk dan jumlah penduduk migrasi keluar pada suatu wilayah.

$$T = I - E$$

Keterangan :

T : Jumlah pertumbuhan penduduk per tahun

I : Jumlah migrasi masuk per tahun

E : Jumlah migrasi keluar per tahun

3. Penduduk Total (*Total Population*)

Jumlah penduduk yang didapat dari selisih antara jumlah kelahiran pertahun dengan jumlah kematian pertahun ditambah dengan selisih antara jumlah

penduduk migrasi yang masuk dengan jumlah penduduk migrasi yang keluar dalam suatu wilayah.

$$T = (L - M) + (I - E)$$

Keterangan :

T : Jumlah pertumbuhan penduduk per tahun

L : Jumlah kelahiran per tahun

M : Jumlah kematian per tahun

I : Jumlah imigran (penduduk yang masuk ke suatu negara/wilayah)

E : Jumlah emigran (penduduk yang meninggalkan ke negara/wilayah)

2.1.4.1 Indikator Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat beberapa faktor yang dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

1. Fertilitas

Lepasnya bayi dari rahim seorang wanita terlepas dari durasi kehamilan, dengan adanya tanda-tanda bernafas atau menunjukkan bukti lain tentang kehidupan, seperti detak jantung, denyut nadi, dari kelahiran tersebut dianggap lahir hidup.

2. Mortalitas

Jumlah kematian pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan. Mortalitas merupakan indikator yang menentukan kesejahteraan penduduk dan merepresentasikan kualitas penduduk dalam suatu wilayah. Tingkat mortalitas yang rendah menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu wilayah, khususnya dalam bidang kesehatan.

3. Migrasi

Perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, baik melewati batas politis negara maupun batas administrasi atau batas bagian dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap.

Banyaknya orang yang menempati suatu wilayah akan menentukan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk diukur dengan jumlah penduduk per kilometer persegi, adapun angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu disebut laju pertumbuhan penduduk. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah metode geometrik (Statistik 2010). Berikut ini merupakan rumus laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode geometrik :

$$r = P (P_t/P_0)^{1/t} - 1$$

Keterangan :

- r : Laju pertumbuhan penduduk
- P_t : Jumlah penduduk tahun t
- P_0 : Jumlah penduduk tahun awal
- T : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Tekanan penduduk pada suatu wilayah akan melahirkan kegiatan dalam mempertahankan atau memperbaiki standar kehidupan penduduk dalam mengorganisasikan diri menjadi semakin baik. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak penduduk semakin banyak angkatan kerja, yang berarti semakin

banyak faktor produksi tenaga kerja, serta akan meningkatkan potensi pasar domestik. Sehingga mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Adapun beberapa cara menurut (Alif, 2017) dalam mengatasi pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat :

1. Menggalakkan program transmigrasi nasional.
2. Memberlakukan tarif tinggi bagi para imigran.
3. Membuat program Keluarga Berencana (KB).
4. Membuat Undang-Undang (UU) yang menetapkan usia minimal menikah.
5. Meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan.
6. Pemerataan dan perluasan lapangan pekerjaan.
7. Membatasi tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga anak kedua.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Pada Tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini, melalui penelitian terdahulu dapat diketahui pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen yang telah diuji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun paparan mengenai penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jasasila (2020).	Pengaruh Tingkat Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011 -2019.	Independen : Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk. Dependen : IPM.	-	Pengaruh tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengaruh jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap IPM.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(1), Mei 2020, 40-44 ISSN 2580-6882 (Online) ISSN 2087-5304 (Print) DOI 10.33087/eksiv11i1.192.
2	Winsy A. Tarumingking, Vekie A. Rimate, Tri Oldy Rotinsulu (2018).	Pengaruh Belanja Modal, dan Tingkat Kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Utara.	Independen : Tingkat Kemiskinan dan Belanja Modal. Dependen : IPM.	-	Belanja modal, berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Tingkat kemiskinan, berpengaruh positif, dan signifikan terhadap IPM.	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.6. 2018 ISSN Online : 2685-3183 ISSN Terbitan : 1907-3593.
3	Asepma Hygi Prihastuti (2018).	Pengaruh Alokasi Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Riau.	Independen : Belanja Modal. Dependen : IPM.	Independen : Pertumbuhan Ekonomi.	Alokasi belanja modal memengaruhi IPM secara tidak langsung (yaitu melalui pertumbuhan ekonomi). Pertumbuhan ekonomi memengaruhi IPM secara tidak langsung.	Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume IV No. 1 - April 2018.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Muliza, T. Zulham, Chenny Seftarita (2017).	Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh.	Independen : Tingkat Kemiskinan. Dependen : IPM.	Independen : Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan PDRB.	Hubungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hubungan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3 Nomor 1, Maret 2017 ISSN. 2502-6976.
5	Novita Dewi (2017).	Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Provinsi Riau.	Independen : Kemiskinan. Dependen : IPM.	Independen : Pertumbuhan Ekonomi.	Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	JOM Fekon, Vol.4 No.1 (Februari) 2017.
6	Ida Ayu Candra Yunita Sari, Ni Luh Supadmi (2016).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.	Independen : Belanja Modal. Dependen : IPM.	Independen : Pendapatan Asli Daerah.	PAD berpengaruh signifikan pada peningkatan IPM. Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan pada peningkatan IPM.	ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3. Juni (2016): 2409-2438.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Rizaldi Zakaria (2017).	Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016.	Independen : Tingkat Jumlah Penduduk, Kemiskinan, dan Belanja Modal. Dependen : IPM.	Independen : Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi.	Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia. Hal.16.
8	Denni Sulistio Mirza (2012).	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.	Independen : Belanja Modal dan Kemiskinan. Dependen : IPM.	Independen : Pertumbuhan Ekonomi.	Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM.	EDAJ 1 (1) (2012) Economics Development Analysis Journal http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	I Gede Made Yudi Antara, I Gede Putu Eka Suryana (2020).	Pengaruh Tingkat Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.	Independen : Tingkat Kepadatan Penduduk. Dependen : IPM.	-	Tingkat kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap IPM.	P-ISSN 0216-8138 E-ISSN 2580-0183 MKG Vol. 21, No.1, Juni 2020 (63-73) DOI: http://dx.doi.org/10.23887/mkg.v21i1.22958 .
10	Etik Umiyati, Amril, Zulfanetti (2014).	Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.	Independen : Belanja Modal. Dependen : IPM.	Independen : Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin.	Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai IPM. Jumlah penduduk miskin berpengaruh positif, dan signifikan terhadap nilai IPM.	Jurnal Sains Sosiohumaniora, LPPM Universitas Jambi Hal.29.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi serta keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara Belanja Modal, Tingkat Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat melalui proses analisis data sebagaimana dapat dilihat dari kerangka teori.

2.2.1 Hubungan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Theory fiscal federalism, merupakan proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang, dan jasa publik dibanding penyediaan hal tersebut oleh pemerintah pusat.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Dewi (2006) dan Syaiful (2008) bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas asset.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu terjadinya perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengenai pemenuhan kebutuhan daerah, diperlukan anggaran dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu peran pemerintah mengalokasikan anggaran melalui realisasi belanja daerah dalam pelayanan publik dengan belanja modal.

Jadi, hubungan antara belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif.

2.2.2 Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Teori Anggaran pro kaum miskin, merupakan penganggaran berdasarkan penilaian kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan proses yang melibatkan kelompok miskin untuk ikut menentukan skala prioritasnya. Anggaran pro kaum miskin dimaknai sebagai sebuah penganggaran yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat, khususnya kelompok masyarakat miskin melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Dewi, 2017) bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak dan menunjukkan pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kemiskinan merupakan variabel penting yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan pengentasan kemiskinan terlebih dahulu agar tingkat kesehatan dan pendidikan meningkat di tiap daerah sehingga dapat meningkatkan pula produktifitas yang disertai daya beli tinggi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga tercipta sumber daya manusia berkualitas dan akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Jadi, hubungan antara tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif.

2.2.3 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Teori Jhon Stuart Mill, bahwa manusia dapat memengaruhi perilaku demografinya, jika produktifitas seseorang tinggi maka terdapat kecenderungan memiliki keluarga kecil (fertilitas rendah). Jika suatu saat terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan tersebut hanyalah bersifat sementara dan dapat ditanggulangi dengan mengimpor makanan atau memindahkan penduduk ke daerah lain. Jhon Stuart Mill menyarankan peningkatan pendidikan sehingga penduduk lebih rasional mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada.

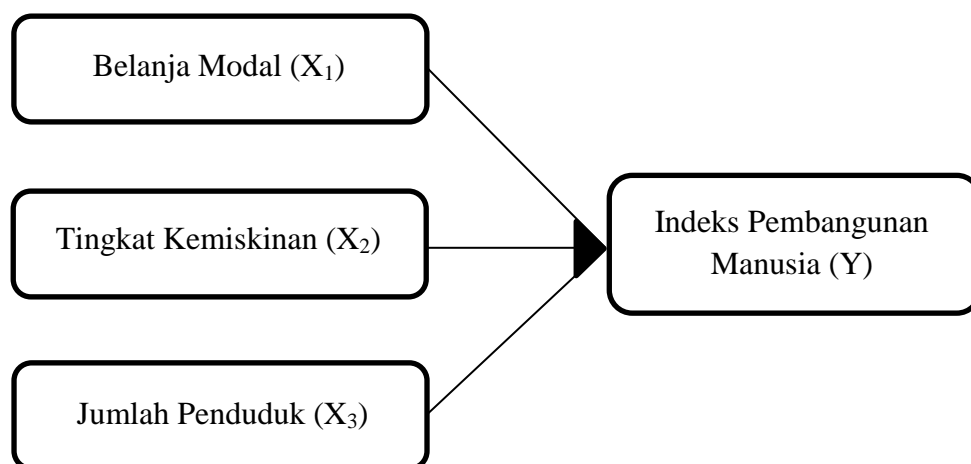
Hal ini sesuai dengan penelitian (Zakaria, 2017) bahwa jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu hubungan yang dimana ketika jumlah penduduk meningkat dapat berpengaruh pada perkembangan pertumbuhan ekonomi secara pesat serta diperkuat juga oleh penelitian (Melliana & Zain, 2013), bahwa dalam proses produksi pasti akan memerlukan tenaga kerja untuk memproduksi sebuah *output*. Hal tersebut dikarenakan ketika jumlah penduduk meningkat maka kebutuhan masyarakat meningkat, konsumsi masyarakat meningkat, dan lapangan kerja meningkat pula. Peningkatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dikarenakan adanya migrasi masuk dari sumber daya manusia yang memiliki keahlian sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja yang disertai peningkatan pendapatan dan menunjukkan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu pemerintah harus benar-benar serius dalam pemberdayaan manusia, karena jika pemberdayaan manusia dilakukan

secara tepat dapat menjadi pemacu pembangunan di suatu wilayah yang dampaknya pun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin meningkat.

Jadi, hubungan antara jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif.

Berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang telah dipaparkan, maka kerangka berpikir mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui analisis terhadap bukti-bukti empiris. Berdasarkan acuan pada dasar pemikiran teoritis dan studi empiris yang pernah dilakukan dengan penelitian di bidang ini dan dengan asumsi *ceteris paribus*, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Belanja Modal dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif, sedangkan Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.
2. Diduga Belanja Modal, Tingkat Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.